

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM  
MEMBERDAYAKAN LEMBAGA KEMASYRAKATAN KAMPUNG  
SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Tengku Aviani  
NPM : 147110774**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Tengku Aviani  
NPM : 147110774  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam  
Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung  
Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten  
Siak.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pembimbing I,



**Drs. Zulkifli, M.Si**

Pekanbaru, 07 April 2021

Pembimbing II,



**Arif Rifa'i Harahap, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui  
Program Studi Kriminologi  
Ketua,



**Lilis Suryani, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Tengku Aviani  
NPM : 147110774  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam  
Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung  
Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten  
Siak.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

  
Nurmasari, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 17 juni 2021

Sekretaris,

  
Eko Handrian, Sos., M.Si

Anggota,

  
Drs. Zulkifli, M.Si  
Anggota,

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

  
Indar Safri, S.Sos., M.Si

Arif Rifa'i Harahap, S.Sos., M.Si  
Anggota,

  
Drs. Syapril Abdullah., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 808/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 16 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Juni 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Tengku Aviani  
NPM : 147110774  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

Nilai Ujian : Angka : "76" ; Huruf : "B+"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Zulkifli, M.Si	Anggota	3. 
4.	Arief Rifai H, S.Sos., M.Si	Anggota	4. 
5.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Anggota	5. 
6.		Notulen	6. 

Pekanbaru, 17 Juni 2021  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 808/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Tengku Aviani  
N P M : 147110774  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

**Struktur Tim :**

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nurmasari, S.Sos., M.Si.    | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si  | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. Zulkifli, M.Si         | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Arief Rifai H, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 5. Drs. Syapril Abdullah, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Juni 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

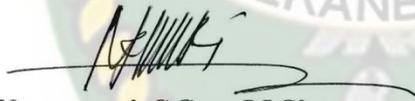
**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Tengku Aviani  
NPM : 147110774  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 17 Juni 2021

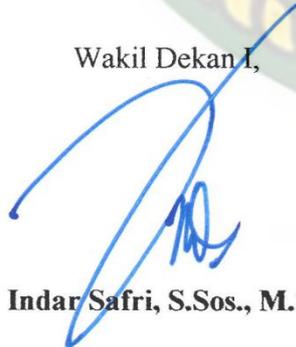
Ketua,

  
Nurmasari, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

  
Eke Handrian, Sos., M.Si

Wakil Dekan I,

  
Indar Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran yang membangun serta masukan dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten. sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Yogia, M.Si selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si selaku ketua program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Arief Rifai Harahap. S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberi arahan, petunjuk dan motivasi demi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Tengku Rusli dan Ibunda Suryani Alamiah yang tetap setia dan selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tulus yang tak henti-hentinya kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff tata usaha yang telah memberi tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan. Terkhusus pada dosen-dosen jurusan Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan pembelajaran dan wawasan yang beliau-beliau berikan selama masa perkuliahan aktif.
8. Kepada seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau terutama yang ada di program studi Administrasi

Publik yang telah memberikan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.

9. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Penghulu Kampung dan jajaran staff kantor desa di Kampung Sungai Kayu ara Kecamatan Sungai apit Kabupaten Siak yang telah bersedia melayani penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah Beliau berikan kepada penulis. Amin..

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 11 Januari 2021  
Penulis,  
Ttd

**Tengku Aviani**  
**NIM. 147110774**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	<b>16</b>
A. Studi Kepustakaan .....	16
1. Konsep Administrasi .....	16
2. Konsep Organisasi.....	19
3. Konsep Manajemen .....	22
4. Konsep Kebijakan .....	24
5. Konsep Evaluasi .....	26

6. Konsep Kewajiban .....	31
7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan ....	31
B. Kerangka Pikir .....	34
C. Hipotesis .....	35
D. Konsep Operasional.....	36
E. Operasional Variabel.....	38
F. Teknik Pengukuran.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Populasi dan Sampel.....	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel .....	44
D. Teknik Penarikan Sampel.....	45
E. Jenis dan Sumber Data .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisa Data .....	47
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	53
B. Gambaran Umum Kampung Sungai Kayu Ara.....	53
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Identitas Responden.....	59

B. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	61
C. Hambatan-hambatan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	82
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran .....	84
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Jumlah Penduduk Kampung Sungai Kayu Ara Berdasarkan Jenis Kelamin .....	8
I.2 : Nama Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara ....	10
I.3 : Potensi Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara .....	10
I.4 : Data Program Pemberdayaan Kampung Sungai Kayu Ara.....	10
I.5 : Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bentuk Pembangunan .....	11
II.1 : Operasionalisasi variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	38
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	44
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	47
V.1 : Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur .....	59
V.2 : Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
V.3 : Distribusi jawaban responden terhadap indikator efektivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	65

V.4.	: Distribusi jawaban responden terhadap indikator efisiensi dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	68
V.5.	: Distribusi jawaban responden terhadap indikator kecukupan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	70
V.6.	: Distribusi jawaban responden terhadap indikator ketepatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	72
V.7.	: Distribusi jawaban responden terhadap indikator responsivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	75
V.8.	: Distribusi jawaban responden terhadap indikator perataan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	79
V.7.	: Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	35
IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Kepenghuluan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar kuestioner penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak .....	92
2	: Daftar pedoman wawancara penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak .....	105
3	: Rekap telly data penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak .....	109
4	: Photo dokumentasi hasil obsevasi penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak .....	110
5	: SK Dekan Fisipol UIR No.9973/E-UIR/27-FS/2020 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Tengku Aviani .....	114
6	: Surat Rekomendasi No.503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/29334 dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau, prihal izin penelitian an. Tengku Aviani .....	115
7	: Surat Rekomendasi No.071/Kesbangpol/342 dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Siak, prihal izin penelitian an. Tengku Aviani .....	116
8	: Surat keterangan No. 140/KSKA/IX/2020/52 tertanggal 02 September 2020 dari Pemerintahan Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Kampung Sungai Kayu Ara, tentang pelaksanaan riset dan pengumpulan data an. Tengku Aviani ..	117

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tengku Aviani  
NPM : 147110774  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemsyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada dengan kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Pelaku Pernyataan



**Tengku Aviani**

**EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM  
MEMBERDAYAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KAMPUNG SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN  
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK**

**ABSTRAK**

Oleh

**Tengku Aviani**

**Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Pemberdayaan**

Pentingnya suatu usaha pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di wilayah kampung adalah dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan anggota lembaga serta dapat membuat masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di kampung demi mewujudkan pemerintahan yang baik dengan keikutsertaan masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah kampung serta lembaga kampung. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah kampung yang mana mengikutsertakan masyarakat dan lembaga serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan di Kampung Sungai Kayu Ara belum terlihat maksimal sesuai dengan informasi dari penulis melalui prasurevey. Masih terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan Kewajiban Penghulu di Kampung Sungai Kayu Ara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban penghulu dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam kategori cukup baik. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam perencanaan program pembangunan yaitu adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan dan lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam organisasi Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut..

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC INSTRUCTIONS  
IN EMPOWERING PUBLIC INSTITUTIONS KAMPUNG SUNGAI KAYU  
ARA KECAMATAN APIT RIVER, SIAK DISTRICT**

**ABSTRACT**

**By  
Tengku Aviani**

**Keywords: Evaluation, Implementation, Empowerment<sup>6</sup>**

*The importance of an effort to empower the community and institutions in the village area is that it can increase the capacity of the community and members of the institution and can make the community participate in every activity in the village in order to create good governance with community participation in collaboration with the village government and village institutions. Some of the activities that have been planned by the village government which involve the community and institutions as well as to carry out programs and activities in empowering social institutions in Sungai Kayu Ara Village have not been seen optimally according to the information from the author through the pre-survey. There are still problems regarding the implementation of the Obligations of the Pengulu in Sungai Kayu Ara Village. The purpose of this study was to evaluate the implementation of the principal's obligations in empowering village community institutions in Sungai Kayu Ara Village, Sungai Apit District, Siak Regency and its inhibiting factors. The research method used is a quantitative method with data collection through interviews, questionnaires, observation and documentation. The result of the research is the Evaluation of the Implementation of the Obligations of the Pengulu in Empowering the Village Community Institutions in Sungai Kayu Ara Village, Sungai Apit District, Siak Regency in the quite good category. Obstacles that occur in the Evaluation of the Implementation of Pengulu Obligations in Empowering Village Community Institutions in Sungai Kayu Ara Village, Sungai Apit District, Siak Regency in planning development programs are the existence of people who do not participate in carrying out development programs and the length of time for disbursement of funds so that programs development cannot proceed smoothly. In the community organization Sungai Kayu Ara Village, Sungai Apit Subdistrict, Siak Regency, there are still members who are not actively involved in the development program.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Undang-undang dasar alinea keempat yaitu “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan Nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniadan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut dibentuklah pemerintahan dimana menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan dan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dibentuk dengan cara berpartisipasi yang mana dimulai

daripemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kampung. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak.

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga mengatur mengenai Desa, yang mana Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak asal usul dan/atau hak tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari Penghulu dan Perangkat Kampung.

Desa menurut Soetardjo (dalam Wasistiono, 2006:7) kata desa sendiri berasal dari bahasa india yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (dalam Widjaja, 2014:3). Pentingnya suatu usaha pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di wilayah kampung adalah dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan anggota lembaga serta dapat membuat masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di kampung demi mewujudkan pemerintah yang baik dengan keikutsertaan masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah kampung serta lembaga kampung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB V pasal 26, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Wewenang, Hak, Tugas dan Kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasi.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kampung dipimpin oleh kepala desa yang mana kepala desa mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender.

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.**
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat.

Dari 15 kewajiban kepala desa di atas, penulis ingin meneliti pada huruf n yaitu memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kampung, dengan alasan dari hasil observasi masih adanya permasalahan yang ditemukan terkait dan pentingnya dilakukan memberdayakan masyarakat serta lembaga masyarakat di desa guna berdampak lancarnya pembangunan desa. Selanjutnya penulis hanya membatasi pada memberdayakan lembaga kemasyarakatan di kampung.

Memberdayakan atau pemberdayaan menurut Carver dan Clatter Back (dalam Riza, 2006:12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut “ upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberi kontribusi pada tujuan organisasi”.

Sedangkan masyarakat menurut Soemardjan (dalam Soekanto, 2006:22) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan

kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang di ikuti oleh kesamaan.

Kemudian lembaga kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka menurut peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung pada pasal 7, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan kampung adat memiliki fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kampung adat kepada masyarakat kampung.
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Menumbuhkan, mengembangkandan menggerakkan prakarsa, pasrtisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Jika dilihat dari kewajiban yang dimiliki, penghulu memiliki tugas yang kompleks yang harus dilaksanakan oleh penghulu sehingga dari hal tersebut terdapat keterkaitan antara kewajiban yang dilakukan pemerintah kampung. Ada pun kewajiban pemerintah kampung antara lain memberikan pelayanan, melakukan pembangunan dan pemberdayaan serta pembuatan keputusan mengenai kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah kampung kepada masyarakat dan lembaga yang ada di kampung.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, otonomi desa mengisyaratkan mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, sehingga diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan kampung itu sendiri dan mendasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma-norma berlaku, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemandirian dan kesatuan kampung.

Sejarah Kampung Sungai Kayu Ara adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang salah satu dari 14 Kampung 1 Kelurahan pada awalnya mendapatkan perkampungan kecil dibawah kepemimpinan Ketua Kampung yang bernama Bemo asal pertama kali kampung ini dirintis pada tahun 1902 oleh suku Domo dengan cara membuka hutan dan melakukan perladangan berpindah-pindah dan menamakan kampung dengan sebutan Sungai Penguling.

Menurut sejarah dari beberapa tokoh masyarakat yang merupakan sesepuh kampung Sungai Kayu Ara bahwa sekitar tahun 1917 telah tumbuh berdiri sebatang pohon besar yang sangat rindang dan dibawahnya mengalir sungai kecil, Pohon tersebut menjadi panduan arah khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dimana pohon tersebut tetap terlihat dari jauh karena ketinggian dan rindang. Pohon tersebut dikenal masyarakat dengan nama pohon Ara atau Kayu Ara. Atas kesepakatan bersama pada tahun 1920 nama Kampung Sungai

Penguling akhirnya diubah menjadi Kampung Sungai Kayu Ara yang diambil dari Sungai dan Pohon Kayu Ara.

Luas wilayah Kampung Sungai Kayu Ara adalah 619,3 Ha berupa daratan dimana 75 % dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan karet dan sawit dan 25 % untuk perumahan masyarakat kampung. Iklim Kampung Sungai Kayu Ara, sebagaimana Kampung-Kampung lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit. Kampung Sungai Kayu Ara mempunyai jumlah penduduk 1.881 jiwa yang dibagi berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel.I.1 : Jumlah Penduduk Kampung Sungai Kayu Ara Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	949
2	Perempuan	932
Jumlah		1.881

Sumber :kantor Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, yang mana jumlah keseluruhan penduduk Kampung Sungai Kayu Ara 1.881 jiwa.Terdiri dari 949 jiwa laki-laki dan 932 jiwa perempuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Klasifikasi Desa dari segi tingkat perkembangan ada tiga yaitu , Desa Swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena tarif pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih di arahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim

secara menetap di sana. Desa Swakarya adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, dimana adat-istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan di imbangi dengan bertambahnya prasarana desa. Desa swasembada atau disebut juga dengan desa maju atau berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa swasembada adalah desa yang lebih maju dari pada desa swakarya dan tidak terikat oleh adat-istiadat. Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Para pemukim sudah banyak berpendidikan setingkat dengan sekolah atas. Jadi Kampung Sungai Kayu Ara menurut klasifikasi desa perkembangannya, Kampung Sungai Kayu Ara termasuk kampung Swasembada.

Kampung Sungai Kayu Ara memiliki tiga dusun serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung Sungai Kayu Ara yaitu 15 rukun tetangga, 6 rukun warga, PKK, Lembaga Adat, LPM dan Karang Taruna (Pemuda ).

Kampung Sungai Kayu Ara berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II dan Kampung Harapan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lalang.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kayu Ara Permai.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lalang.

Kampung Sungai Kayu Ara salah satu dari 14 Kampung Yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah membentuk lembaga kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung Sungai Kayu Ara dibentuk karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan aspirasi dan masukan bagi pemerintah kampung demi tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kampung yaitu, seperti tabel dibawah ini.

**Tabel I. 2: Nama Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara**

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan Kampung
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK)
2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3	Karang Taruna
4	Rukun Tetangga (RT)
5	Rukun Warga (RW)

Sumber : Kantor Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara

Adapun potensi masyarakat yang ada di Kampung Sungai Kayu Ara yang rata-rata bertani dan bertenak, seperti terlihat di tabel bawah ini :

**Tabel I. 3: Potensi Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara**

No	Potensi Masyarakat	KK
1	Bertani	246 KK
2	Nelayan	41 KK
3	Pedagang	22 KK
4	Buruh	28 KK
5	Pegawai Negeri	37 KK
6	Pegawai Swasta	72 KK

Sumber : Kantor Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara

Dari tabel diatas potensi masyarakat di Kampung Sungai Kayu Ara sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas

lainnya. Adapun program pemberdayaan yang ada di Kampung Sungai Kayu Ara dapat di lihat tabel berikut ini :

**Tabel 1. 4: Data Program Pemberdayaan Kampung Sungai Kayu Ara**

No	Bentuk Pemberdayaan	Uraian Program/Kegiatan
1	Bidang Kesehatan	1. Pelatihan 2. Posyandu Lansia dan Balita 3. PHBS
2	Bidang Kelembagaan	1. Pelatihan 2. Penyelenggaraan Kegiatan Gotong royong 3. PKK
3	Bidang Ekonomi	1. Industri rumah tangga 2. Kelompok tani dan perternakan 3. Koperasi/BUMDes
4	Bidang Pendidikan	1. Pelatihan guru 2. PAUD 3. TPQ/MDA

Sumber : Kantor Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara

**Tabel I.5 : Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bentuk Pembangunan**

No	Pembangunan	Lokasi
1	2	3
1	Semenisasi Gg. Swadaya III	RT 07
2	Pembangunan Kantor PDTA	RT 07
3	Rehabilitas PDTA	RT 07
4	Pembangunan jembatan Gg. Pangkalan Badak	RT 13
5	Drainase	RT 07

Sumber : Kantor Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara

Tabel diatas menjelaskan bagaimana pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah Kampung Sungai Kayu Ara pada tahun 2017, terlihat pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan kemajuan masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara. Dengan adanya pembangunan ini akan mempermudah roda perekonomian masyarakat yang lebih baik.

Pentingnya suatu usaha pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di wilayah kampung adalah dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan anggota lembaga serta dapat membuat masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di kampung demi mewujudkan pemerintahan yang baik dengan keikutsertaan masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah kampung serta lembaga kampung.

Maka dari itu seluruh usaha dalam rangka memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung harus dinilai dan di perbaiki atau di evaluasi dengan melihat pengertian evaluasi menurut Stanley and Hopkins (dalam Ali, 2014:370). Mengartikan evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian tentang suatu nilai. Sehingga penting bagi setiap instansi pemerintah khususnya pemerintah kampung untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah ditentukan.

Dari peraturan yang dijelaskan sebelumnya terlihat bahwa penghulu memiliki kewajiban yang sama seperti peraturan sebelumnya, yang mana jika di lihat merupakan keharusan bagi penghulu dalam melakukan semua kewajiban yang dimiliki oleh penghulu dan melaksanakan pemerintahan, pelayanan serta pemberdayaan terhadap masyarakat dan kelembagaan yang ada di Kampung Sungai Kayu Ara.

Beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah kampung yang mana mengikutsertakan masyarakat dan lembaga serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan di Kampung Sungai Kayu Ara belum terlihat maksimal sesuai

dengan informasi dari penulis melalui prasurvey. Masih terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan Kewajiban Penghulu di Kampung Sungai Kayu Ara maka dapat diketahui fenomena yang terjadi, meliputi :

1. Kurang optimalnya peran pemerintah Kampung khususnya Penghulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bermusyawarah dikampung melalui musyawarah bersama antar kampung untuk membuat atau merencanakan program pembangunan desa.
2. Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara sehingga untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kampung hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya, misalnya kegiatan posyandu dan siskamling yang kurang rutin dilaksanakan.
3. Masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antara penghulu dengan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan prasarana Kampung Sungai Kayu Ara.

Berdasarkan fenomena dan indikasi permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi, dengan judul penelitian :**“Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, terlihat bawasannya kewajiban penghulu yang mana dalam pelaksanaan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung yang seharusnya wajib dilaksanakan terlihat masih belum maksimal dari hasil yang senyatanya, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : **“Bagaimana Hasil Pelaksanaan Kewajiban penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan kampung di kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”**.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Kewajiban penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. Bagi Teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.
- b. Bagi Akademis, sebagai sumbangan informasi kepada pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah desa tentang pelaksanaan

kewajiban penghulu dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan kampung di kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

- c. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan kewajiban penghulu dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan kampung di kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

##### 1. Konsep Adminstrasi

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005:17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yang di kemukakan oleh Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005:21-23) sebagai berikut:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Adminstrasi merupakan suatu hayar atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayar adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staff, dan personil lainnya.

- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya terutama para staff.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi.
- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behavior or administration as special type of social behavior*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special type of human behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan suatu yang memerlukan kemampuan, kemahiran, ketrampilan (*skills*) yang hanya dapat di peroleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan *overall management* dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumber daya – sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumber daya-sumber daya (*resources*) dimaksud meliputi : orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machine*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara teknik (*methods-technology*), ruang (*space*), tenaga atau energy (*energy dan waktu (time)*). Dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang di berikan oleh para pemilik organisasi.

Menurut siagian (2003:2) mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004:37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta

penemuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien, jadi tanpa adanya kerja sama suatu organisai itu tidak dapat akan berjalan dengan baik.

Mengacu pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau kelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung dimanfaatkannya untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Seperti permasalahan pokok yang dikemukakan oleh Pasolong (2007:2) antara lain : siapa yang harus melayani dan dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Jawaban yang pasti tidak lain ialah manusia itu sendiri. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia. karena manusia merupakan sumber adanya kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisai dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efesien dan efektif.

Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikajikan adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Syafiie (2003:32) dalam bukunya “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi Negara, yaitu :

- a. Tidak dapat dielakan (*unavoidable*)
- b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*)
- c. Mempunyai prioritas (*has priority*)
- d. Mempunyai pengecualian (*has exceptional*)
- e. Puncak pimpinan politik (*top management political*)
- f. Sulit di ukur (*difficult to measure*)
- g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (*more is expected of public administration*).

## 2. Konsep Organisasi

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilakukan apabila para organisator atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Defenisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Organisasi secara umum merupakan bentuk kerjasama antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama, organisasi menurut Anderson

dan Frederick B.Parker (dalam Sukidin, 2011:195) adalah struktur hubungan manusia yang didalamnya terdapat tujuan tertentu dan memiliki unit yang diatur secara sistematis untuk memajukan dan mengejar tujuan atau kepentingan bersama yang secara spesifik tidak dinyatakan dalam institusi. Organisasi terdiri atas dua pokok yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.

Organisasi terbagi menjadi dua pengertian yaitu organisasi dalam arti statis dan dinamis, adapun pengertian organisasi dalam arti statis sebagaimana dikemukakan Nabawi (2008:9) bahwa organisasi dalam arti pengertian statis adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama, dari pengertian tersebut terlihat bahwa sifat statis terletak pada dua kondisi yaitu : setiap organisasi memiliki suatu batas yang relatif kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkap tujuan bersama.

Dalam organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar organisasi dapat berjalan. Seperti, yang dikemukakan Nabawi (2008;11) bahwa pada dasarnya organisasi memiliki 4 unsur pokok, keempat unsur itu adalah :

1. Manusia, yaitu: yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu: manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu : kerja sama dalam organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu : organisasi didirikan oleh manusia adalah karena kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Meskipun rumusan defenisi yang diberikan para ahli tampak berbeda namun titik umum pandangannya adalah sama, yaitu suatu organisasi dipahami sebagai wadah manusia / individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasikan / terkoordinasikan sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama.

Atas dasar pemahaman organisasi tersebut ditemukan yaitu (a) adanya sekelompok orang (b) adanya kerja sama (c) adanya pengaturan hubungan dan (d) memiliki tujuan yang hendak dicapai organisasi.

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa : suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

1. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (*hierarchy*). Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf. Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2002:100), mengemukakan “konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu”.

Dengan organisasi tercipta ketepatan pikiran, konsepsi tindakan dan keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

### 3. Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2007:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Siagian (2006;5) manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Menurut Terry dalam Hadari Nawawi (2000:36) manajemen adalah pencapain tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.

Dan, menurut Handoko (dalam Martoyo,2005:5) ada 3 alasan utama dilakukannya manajemen yaitu, terdiri dari :

1. Untuk mencapai tujuan. Maksudnya, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Maksudnya, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Maksudnya suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Darwis (2009;4) mengemukakan bahwa dengan demikian, manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk menggerakkan sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, manajemen diperlukan dalam suatu organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada maka dari itu diperlukansuatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009:16), menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan serangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang akan pengarahannya fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu :

- a. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.
- b. Pembuatan keputusan, adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerja sama.
- c. Pengarahan, adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah dicapai.
- d. Pengkoordinasian, adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga menjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijakan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertantangan, kekacauan, kekembaran, kekosongan tindakan.

- e. Pengontrolan, adalah kegiatan yang mengusahakan agar melaksanakan pekerjaan serta hasil sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan.
- f. Penyempurnaan, adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Akumulasi fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Zulkifli

(2009 : 43). Dapat disimpulkan menjadi enam belas diantaranya sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*planning*)
- b. Pengambilan keputusan (*decision making*)
- c. Pengorganisasian (*organizing*)
- d. Penyusunan staf (*staffing*)
- e. Pengarahan (*directing*)
- f. Pelatihan (*training*)
- g. Pemberian motivasi (*motivating*)
- h. Penggerakan (*actuating*)
- i. Pemimpin (*leading*)
- j. Pengkoordinasi (*coordinating*)
- k. Pengawasan (*controlling*)
- l. Pelaporan (*reporting*)
- m. Penilaian (*evaluating*)
- n. Penyempurnaan (*correcting*)
- o. Pengendalian (*reining*)
- p. Penggerakan (*poodgeting*)

#### 4. Konsep Kebijakan

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), karena kebijaksanaan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang, publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam peraturan hukum tata negaranya. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli adalah Dye (dalam Syafiie, 2005:105) dimana dikatakan kebijaksanaan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2010:38) kebijaksanaan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajaran dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa : (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternative untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik (dalam Pasolong, 2010:39).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa suatu dari kebijakan. Karena itu terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang pentng dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah (Sumaryadi, 2013 : 83).

Kata kebijakan diterjemahkan dari kata *policy*. Kata *policy* berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta : polis (negara kota) dan pur (kota), dikembangkan kedalam bahasa Latin menjadi *politie* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pada abad pertengahan, dikenal dengan *policy* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Pada hakikatnya berarti kebijakan

yang diambil oleh pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakuran, kesejahteraan warga kota atau masyarakat (Sumartadi, 2013:83).

Dye (dalam Santosa, 2009:27) memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan.

## 5. Konsep Evaluasi

Evaluasi menurut Ndraha (2003:201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukurannya adalah *before*.
- b. Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- c. Model kelompok *control-kelompok* tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Evaluasi menurut santoso (2004:31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008:2) bahwa: Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maer untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya Winarno (2007:230) mengemukakan enam langkah dalam

Evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam subarsono, 2013:126), mencakup lima indikator yaitu;

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
3. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

a. Efektifitas

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

b. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

### c. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Dunn (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal, sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha adil di distribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

### d. Responsivitas

Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dinilai melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai disarankan oleh masyarakat.

### e. Ketepatan

Ketepatan menunjuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan dari kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria

kelayakan hubungkan dengan rasioanlitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substantif tujuan bukan cara atau instrument untuk menyelesaikan tujuan tersebut.

Menurut Singian (2002:147) Evaluasi (Penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilain harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Menurut Nurcholis (2005:67) menyatakan Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari *input, proses, output dan outcome* (hasil), melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Menurut Tangkilisan (2003:28), walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok yaitu indikator *input, process, output dan outcome*. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002:40) yaitu :

- a. *Utility* (manfaat)  
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
- b. *Accuracy* (akurat)  
Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat tinggi.
- c. *Feasibility* (layak)  
Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Umar, 2000:41-42), yaitu :

- a. *Sistem assessment*  
Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.
- b. *Program planning*  
Yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.
- c. *Program implementation*  
Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.
- d. *Program Improvement*  
Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.
- e. *Program Certification*  
Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program.

Kriteria evaluasi menurut Tangkilisan (2003:62) ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas yang mengidentifikasi apakah pencapaian tujuan yang diinginkan telah optimal.
2. Efisiensi menyangkut apakah manfaat yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dari program publik sebagai fasilitas yang dapat memadai secara efektif.
3. Responsivitas yang menyangkut, mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau keinginan, prefensi atau nilai kelompok tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya.

Evaluasi menurut Stanley and Hopkins (dalam buku Mohammad Ali : 2014 : 370) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian tentang suatu nilai.

- a. Lingkungan
- b. Budaya
- c. Sarana
- d. Prasarana
- e. Sumber Daya

## 6. Konsep Kewajiban

Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan, Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Menurut Curzon (2008:89) kewajiban dikelompokkan menjadi lima yaitu :

- a. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nasib melibatkan hak dilain pihak.
- b. Kewajiban publik, dalam hukuman publik yang berkolerasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkolerasi dengan hak perdata.
- c. Kewajiban positif mengkehendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif tidak melakukan.
- d. Kewajiban universal atau umum ditunjuk kepada semua warga negara atau secara umum diajukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, kewajiban.
- e. Kewajiban primer tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.

## 7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kampung

Menurut Suharto (2006:76), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Selanjutnya menurut Naning Maradiana dalam Wirutomo dkk (2003:129) pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (power) dan menggantikan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu system maupun organisasi.

Menurut Soetomo (2011:69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003:169), ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Selanjutnya Sedarmayanti (2004:116) mengemukakan pemberdayaan dalam pengembangan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pemberdayaan yang sifatnya fleksibel, yaitu :

- a. Persiapan Preparation.
- b. Pengembangan kontak dengan klien.
- c. Pengumpulan data dan informasi.
- d. Perencanaan dan analisi.
- e. Bekerja dengan kelompok komunitas.
- f. Penyadaran diri dan bersama untuk perubahan yang ingin dicapai.
- g. Evaluasi / monitoring.
- h. Kesepakatan bersama (Wirutomo dkk, 2001:133).

Organisasi menurut Bernard (dalam Manullang, 2001:59) menyatakan organisasi sebagai suatu system dari aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Siagian (2003:37) mengidentifikasi organisasi sebagai :“Sekelompok orang yang terkait secara formal dan hirarkhis serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Hanafie (2010:10) lembaga adalah badan, organisasi, kaidah dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai suatu tujuan tertentu. Lembaga-lembaga bentukan pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang mantap serta sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan kampung. Bentuk kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelembagaan primer dan kelembagaan sekunder. Unsur-unsur kelembagaan primer mencakup pemerintah, kekayaan, industri, pendidikan, agama dan keluarga.

Anantanyu (2011:37) juga menjelaskan kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi dan aktivitas yang berpusat disekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

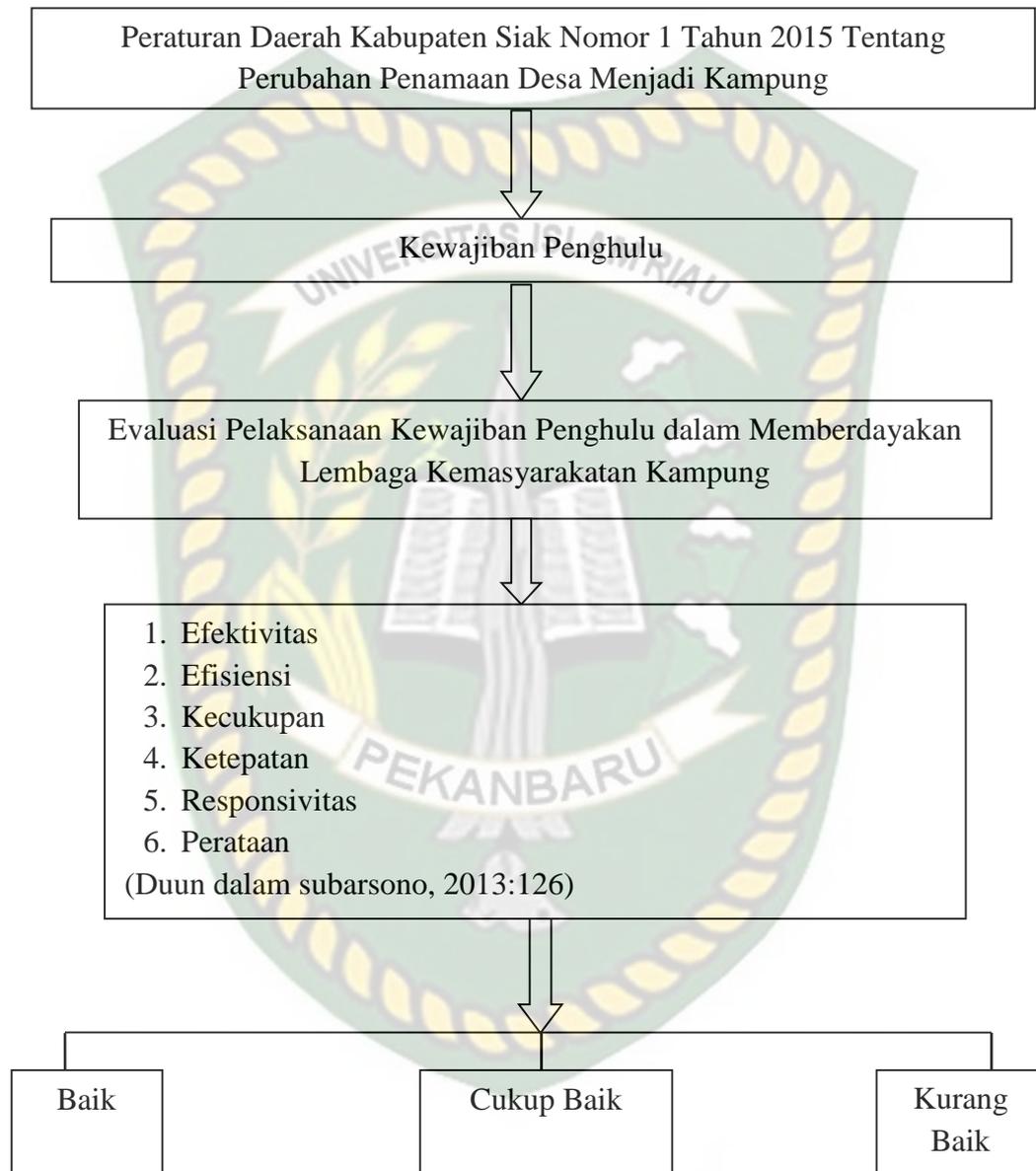
Selanjutnya Nugroho (2010:14) kelembagaan diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol

lingkungan serta menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan sehingga perilaku manusia dalam memaksimalkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi. Definisi tersebut mengimplikasikan 2 komponen penting dalam kelembagaan, yaitu aturan main (*Rules of the game*) dan organisasi (*Players of the game*). Keduanya sulit dipisahkan karena organisasi dapat berjalan apabila aturan main mengizinkan atau memungkinkan, sebaliknya aturan main disusun, dijalankan, dan ditegakkan oleh organisasi.

### **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan beberapa teori yang telah penulis angkat di atas maka selanjutnya disini akan dibuat kerangka pikir mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ”, maka penulis menjelaskan hubungan unsure-unsur dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**



Sumber : Hasil Modifikasi Tahun 2021

### C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiono, 2003;70)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas serta dihubungkan dengan landasan teori yang ada maka mengemukakan hipotesis sebagai berikut : “diduga Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara belum terlaksana dengan baik”.

#### **D. Konsep Operasional**

Dalam penyatuan pandangan antara penulis dan pembaca dalam melakukan penelitian Ini, untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Maka penulis membuat konsep operasional penelitian sebagai berikut:

1. Administrasi adalah proses (rangkai) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan secara efisien.
2. Organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama.
3. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.
4. kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat.
6. Pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah penghulu dan kadit sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan desa
7. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.
8. Efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.
9. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan
10. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
11. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
12. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

13. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

### E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan enam indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

**Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Sub Variabel	Item Penilaian	Ukuran
Evaluasi adalah berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2013 : 608).	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	1. Efektivitas	a. Diketahuinya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait b. Diketahuinya tindakan apa yang dikerjakan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Efisiensi	a. Adanya upaya sidak b. Adanya upaya mencegah pelanggaran aturan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Kecukupan	a. Mendisiplinkan pegawai b. Mengikuti penetapan peraturan yang berlaku	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Ketepatan	a. Mengikuti peraturan yang berlaku b. Melakukan pengawasan secara langsung	Baik Cukup Baik Kurang Baik

		5. Responsivitas	a. Tidak ada paksaan b. Mengikuti peraturan yang telah berlaku	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		6. Perataan	a. Mewajibkan pelaksanaan peraturan kepada semua pegawai b. Menetapkan sanksi bagi yang melanggar secara adil	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

## F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap indikator variable penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert (Sugiyono, 2010:107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

**Baik** : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori baik atau pada ukuran 67-100%

**Cukup Baik** : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori baik dengan pengukuran 34-66%.

**Kurang Baik** : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori baik atau dengan pengukuran 0-33%. Adapun untuk indikator evaluasi teknik pengukurannya sebagai berikut :

### 1. Efektivitas

**Baik** : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

## **2. Efisiensi**

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

## **3. Kecukupan**

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

## **4. Perataan**

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 1 dari 2 item penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

### **5. Responsivitas**

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 1 dari 2 item penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

### **6. Ketepatan**

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 1 dari 2 item penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif yaitu menerapkan atau menguraikan keadaan riil dilapangan yang berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan Tipe Kuantitatif.

Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Karena menurut Sugiyono (2012;8) Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, hal ini sesuai dengan observasi dilapangan dan dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Kampung Sungai Kayu Ara yang mana masih terlihat kurang maksimalnya pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kampung.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Menurut Arikunto (2006:130) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Penghulu Kampung, Perangkat Kampung, Kepala Dusun, Ketua dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara. Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi sendiri.

### **2. Sampel**

Sampel menurut Sutrisno Hadi adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan penelitian (dalam Narbuko dan Abu Achmadi, 2008:107). . Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara, Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara. Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi sendiri.

**Tabel. III.1: Daftar Populasi dan Sampel penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No	NamaPopulasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penghulu kampung	1	1	100%
2	Perangkat kampung – Sekertaris kampung – Kaur umum – Kaur pemerintahan – Kaur pembangunan	10	5	50%
3	Kepala dusun	3	3	100%
No	NamaPopulasi	Populasi	Sampel	Persentase
4	Ketua dan Anggota lembaga pemberdayaan masyarakat	5	5	100%
5	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	5	5	100%
6	Karang Taruna	5	5	100%
7	Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW)	8	4	50%
8	Masyarakat	~	15	100%
Jumlah		-	30	-

Sumber : Hasil Modifikasi Tahun 2021

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk penghulu, perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan kampung serta kepala dusun adalah teknik sensus. Menurut Sugiyono (2015:53) sensus adalah teknik penentuan sampel bila pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi di selidiki satu persatu.

Kemudian untuk masyarakat menggunakan teknik accidental sampling yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila

dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2015:55).

### **E. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Data primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan kegiatan Kewajiban Penghulu di Kampung Sungai Kayu Ara, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat menilai terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

#### 2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini yang mana wawancara ini dilakukan Kepada Penghulu Sungai Kayu Ara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua Pemuda.

### 3. Kuesioner

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis untuk kemudian diajukan dengan langsung datang kerumah dan memberi arahan terlebih dahulu bagaimana cara menjawab kuisisioner yang akan diberikan kepada para responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara deskriptif sesuai dengan data dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk presentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian ini disusun seperti yang terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel III. 2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu 2018/2019																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2.	Seminar UP					■															
3.	Revisi UP						■	■	■												
4.	Revisi kuisisioner									■	■	■	■								
5.	Rekomendasi survey													■	■	■	■				
6.	Survey lapangan																	■	■	■	■
7.	Analisis data																				
8.	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)																				
9.	Konsultasi revisi skripsi																				
10.	Ujian komprehensif skripsi																				
11.	Revisi skripsi																				
12.	Penggadaan skripsi																				

Sumber: Hasil Modifikasi Tahun 2019

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Siak yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Pada awalnya Siak termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Siak. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Siak Kanan dan Sungai Siak Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Siak Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Siak. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugal, melarikan diri ke Siak, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Siak. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Siak waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Siak. Dalam

perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Kabupaten Siak dengan luas lebih kurang 27.908,32 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Utara	Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Selatan	Kabupaten Kuantan Singingi
Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)
Timur	Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Siak dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Siak yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Siak yang meliputi Kecamatan XIII Koto Siak, Bangkinang, Bangkinang Barat, Siak, Sungai Apit, dan Siak Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Siak ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Siak pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi

pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Siak Kiri.

Kabupaten Siak pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Siak menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VIII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Siak terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Siak. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Siak memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (ibu kota: Bangkinang).
2. Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok).
3. Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai).
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
5. Siak (ibu kota: Air Tiris).
6. Siak Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
7. Siak Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
8. Siak Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
9. Siak Timur (ibu kota: Siak).
10. Siak Utara (ibu kota: Desa Sawah).
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Sungai Apit (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
16. Tapung (ibu kota: Petapahan).
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Siak (ibu kota: Batu Besurat).
20. Siak Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).
21. Koto Siak Hulu (ibukota: Tanjung)

Jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2010 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio

jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Siak kerap menyebut diri mereka sebagai *Oughang Siak*, tersebar di sebagian besar wilayah Siak. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Siak baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia*, 1953, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Siak ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Siak sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Siak yaitu 333 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Siak Utara 226 jiwa/km<sup>2</sup>. Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Siak Timur, masing – masing 216 jiwa/km<sup>2</sup>, 191 jiwa/km<sup>2</sup>, 158 jiwa/km<sup>2</sup>, 154 dan 131 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Siak Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km<sup>2</sup> dan Siak Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km<sup>2</sup>.

### **B. Gambaran Umum Kampung Sungai Kayu Ara**

Kampung Sungai Kayu Ara adalah merupakan daerah wilayah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara dikenal karena pada zaman dahulu adanya kampung lama di pinggir sungai Siak. Nama kampung tersebut adalah Rantau Panjang, Teluk Sejati dan Ambang Cempedak. Sedangkan Kampung Sungai Apit merupakan tempat persinggahan masyarakat dari kampung lama menuju Kota Pekanbaru, yang menurut bahasa masyarakat pangkalan = tempat singgah jadi menjadi sebutan tempat/daerah tersebut dengan nama Kampung Sungai Apit. Dengan adat istiadat yang turun temurun diwarisi oleh masyarakat adat setempat.

Letak geografi Kampung Sungai Kayu Ara, terletak diantara:

Sebelah Utara	: Kota Pekanbaru
Sebelah Selatan	: Desa Buluh Cina
Sebelah Barat	: Desa Desa Baru
Sebelah Timur	: Desa Buluh Nipis

Luas wilayah Desa

Pemukiman	: 6.250	ha
Perkuburan	: 4	ha
Prasarana Umum/Kantor	: 4	ha
Perusahaan Perkebunan	: 2.000.000	ha

Perkebunan Masyarakat	: 1.500	ha
Hutan Wisata	: -	ha
Lahan Kosong	: 1.500	ha
Sekolah	: 10	ha
Jalan	: 50	ha
Lapangan Sepak Bola	: 3	ha
Danau	: 10	ha

#### Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 1.643 KK
2. Laki-laki : 3.072 Orang
3. Perempuan : 2.819 Orang
  - a. Pendidikan
    1. SD/MI : 1.501 Orang
    2. SLTP/MTs : 908 Orang
    3. SLTA/MA : 1221 Orang
    4. S1 / Diploma : 50 Orang
    5. Putus Sekolah : 50 Orang
    6. Buta Huruf : 10 Orang
  - b. Lembaga Pendidikan
    1. Gedung TK/PAUD : 1 Buah
    2. SD/MI : 4 Unit
    3. SLTP/MTs : 2 Unit
    4. SLTA/MA : 1 Unit

5. MDA/PDTA : 2 Unit

6. Perguruan tinggi : -

c. Kesehatan

a) Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi Lahir pada tahun ini : 45 Orang

2. Jumlah Bayi Meninggal tahun ini : - Orang

b) Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah Ibu Melahirkan tahun ini : 45 Orang

2. Jumlah Ibu Melahirkan meninggal tahun ini : - Orang

c) Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 Orang

2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 Orang

3. Cakupan Imunisasi Cacar : 30 Orang

d) Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 467 Orang

2. Balita Gizi Buruk : - Orang

3. Balita Gizi Baik : 467 Orang

4. Balita Gizi Kurang : - Orang

e) Pemenuhan Air Bersih

1. Pengguna Sumur Galian : 857 KK

2. Pengguna Sumur Bor : 750 KK

3. Pengguna Air PAH : - KK

4. Pengguna Sumur Pompa : - KK

- |                               |     |    |
|-------------------------------|-----|----|
| 5. Pengguna Sumur Hidran Umum | : - | KK |
| 6. Pengguna Air Sungai        | : - | KK |

d. Keagamaan

1. Data Keagamaan Kampung Sungai Kayu Ara Tahun 2016

Jumlah Pemeluk :

- |            |        |       |
|------------|--------|-------|
| a. Islam   | : 5700 | Orang |
| b. Katolik | : 51   | Orang |
| c. Kristen | : 53   | Orang |
| d. Budha   | : -    | Orang |
| e. Hindu   | : -    | Orang |

2. Data Tempat Ibadah :

Jumlah tempat ibadah :

- |          |     |      |
|----------|-----|------|
| Masjid   | : 5 | Buah |
| Musholla | : 4 | Buah |
| Gereja   | : - | Buah |
| Pura     | : - | Buah |
| Vihara   | : - | Buah |

a) Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|
| 1. Penghulu        | : 1 | Orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 | Orang |
| 3. Perangkat Desa  | : 9 | Orang |
| 4. BPD             | : 9 | Orang |

## b) Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM	: 1
2. PKK	: 1
3. Posyandu	: 4
4. Pengajian	: 5
5. Arisan	: 5
6. Simpan Pinjam	: 5
7. Kelompok tani	: 15
8. Gapoktan	: 1
9. Karang Taruna	: 1
10. Risma	: -
11. Ormas/LSM	: -
12. Lain-lain	: 2

## c) Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun I	: Jumlah RW 4, Jumlah RT 9
2. Dusun II	: Jumlah RW 2, Jumlah RT 5
3. Dusun III	: Jumlah RW 2, Jumlah RT 7
4. Dusun IV	: Jumlah RW 3, Jumlah RT 6

Pada umumnya selama kami menjabat selaku Penghulu mulai tahun 2013 pelaksanaan Pemerintahan Desa baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berjalan dengan baik. Hal tersebut berkat adanya arahan dan

bimbingan dari DPMD Kabupaten Siak, bagian Tata Pemerintahan, bagian Hukum dan HAM Sekretariat daerah Kabupaten Siak, Bapak Camat Sungai Apit serta dukungan penuh dan kerja sama yang baik dari BPD Kampung Sungai Kayu Ara. Dengan adanya dukungan serta kerja sama yang baik selama ini antara Pemerintah Desa dengan BPD sehingga dapat membuat peraturan Desa dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa melalui musyawarah dan mufakat.

Begitupun halnya dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yakni RT, RW, LPM, PKK dan Pemuda yang merupakan mitra bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa di mana melalui bidangnya masing-masing telah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari pada responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

##### A.1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden pada Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur**

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	-	-
2.	21-30 tahun	15	50%
3.	31-40 tahun	11	37%
4.	> 41 tahun	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan. 2021

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 21-30 tahun yakni sebanyak 15 orang atau 50%, responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 11 orang atau 37% responden pada klasifikasi umur tersebut dan responden yang berumur > 41 tahun sebanyak 4 orang atau 13%. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada paada tingkat umur 21-30 tahun.

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivita kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain.

#### **A.2. Jenis Kelamin**

Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	17	57%
2.	Perempuan	13	43%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 17 orang atau 57%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 13 atau 43%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki.

Selain umur, jenis kelamin juga dapat berpengaruh dari pekerjaan yang diberikan. Pada umumnya pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian perusahaan atau instansi mempekerjakan seseorang bukan dilihat dari jenis kelamin tetapi lebih dari kemampuan dan pendidikan yang dimiliki pegawai tersebut.

**B. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

Salah satu kewajiban Penghulu adalah memberdayakan kehidupan Desa. Dalam memberdayakan kehidupan Desa, Penghulu mempunyai wewenang bekerja sama dengan BPD dalam membuat Peraturan Desa yang berhubungan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan kampung. Maka dari itu peran Penghulu menjadi hal yang penting dalam pembangunan khususnya pembinaan kehidupan Desa pada beberapa aspek, meliputi : Agama, Pendidikan, Kesehatan, Budaya dan Kehidupan Sosial.

Pembinaan menurut Efendi (2003:24) adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Terlihat pentingnya usaha pembinaan yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kemampuan bawahan atau masyarakat disuatu Desa dengan memberikan bimbingan dan pendidikan menuju kondisi organisasi yaitu Desa

kearah yang lebih baik. Tujuan pembinaan meliputi: mengkoordinasi kegiatan, memelihara hubungan antar individu, dapat menyalurkan ide dan saran yang dimiliki oleh pimpinan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

Dari pengertian pembinaan diatas terlihat bahwa tugas Penghulu dalam melakukan pembinaan mempunyai tujuan memberikan pengetahuan dalam rangka perbaikan kondisi masyarakat Desa khususnya masyarakat Kampung Sungai Kayu Arayang mana dalam pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan, Penghulu melakukan bimbingan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa dimana Penghulu berwenang.

Permasalahan yang terjadi masih kurangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kampung Sungai Kayu Ara, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rapat Desa, tidak adanya pengadaan acara kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan Desa di Kampung Sungai Kayu Ara, sehingga dari seluruh penjelasan aspek lembaga kemasyarakatan kampung diperlukan pembinaan dan kewenangan dari Penghulu Kampung Sungai Apit, maka dari itu apabila pembinaan lembaga kemasyarakatan kampung dilakukan dengan baik maka lembaga kemasyarakatan kampung akan menjadi semakin baik, maju serta dapat melestarikan adat istiadat. Berikut dapat diuraikan hasil tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan kewajiban penghulu dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak :

### a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah

gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator efektivitas dalam evaluasi pelaksanaan kewajiban penghulu dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.3. Distribusi jawaban responden terhadap indikator efektivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Ada manfaat bagi kepentingan umum	8 (27%)	22 (73%)	0	30 (100%)
2.	Melayani masyarakat dengan baik	7 (23%)	23 (77%)	0	30 (100%)
	Jumlah	15	45	0	60
	Rata-rata	7	23	0	30
	Persentase	23%	77%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai efektivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam kategori cukup baik adalah sebanyak 77%, hal ini dinyatakan bahwa adanya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program pendidikan akan dilakukan misalnya dengan mendirikan PAUD, tetapi realisasinya tidak mencapai target serta tidak dapat mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program tersebut karena permasalahan yang terjadi terkait dengan program yang ditetapkan oleh kepala rapat. Hal ini yang menyebabkan target pelaksanaan dari program tidak dapat berjalan secara optimal dan program yang akan dicapai belum tersusun dengan baik sehingga sampai saat ini pembangunan PAUD belum terlaksana secara optimal.

Sementara itu hasil wawancara dengan Penghulu Bapak Baharuddin pada tanggal 05 September 2021, diketahui bahwa dalam melakukan musyawarah ini ada target-target yang akan dicapai, misalkan target penyelesaian bangunan PAUD dan program paket C serta program-program apa saja berkaitan dengan pendidikan yang akan dilakukan dan pencocokan anggaran dengan program yang telah ditetapkan tersebut. Program kesehatan yang dilakukan dengan kegiatan POSYANDU dilaksanakan sudah secara efektif karena rutin dilakukan setiap bulannya oleh ibu-ibu PKK. Kami sangat berharap program yang akan kami laksanakan untuk pembangunan desa ini menjadi terwujud.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ada terjadinya penetapan program pembangunan yang tidak terealisasi saat pelaksanaannya khususnya pada program pendidikan yang disediakan oleh pihak pemerintah desa yaitu program paket C yang dinilai juga kurang efektif karena tidak semua masyarakat yang tertarik untuk mengikutinya karena disebabkan kesibukan dan faktor mata pencaharian penduduk, hal ini terkait anggaran desa yang kurang serta tidak adanya pengawasan pihak penghulu di lapangan sehingga program yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan. Permasalahan ini menjadi pembelajaran agar pihak desa harus merinci semua kegiatan serta anggaran yang sesuai sehingga proses pembangunan kedepannya lebih optimal.

Dapat disimpulkan indikator efektivitas dalam kategori cukup baik, hal ini diartikan belum tercapai target pelaksanaan dari program pemberdayaan yang tidak dapat berjalan secara optimal dan program yang akan dicapai belum tersusun dengan baik sehingga sampai saat ini pembangunan desa belum sepenuhnya selesai.

## b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator efisiensi dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.4. Distribusi jawaban responden terhadap indikator efisiensi dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Terlaksananya tugas penghulu	5 (17%)	25 (83%)	0	30 (100%)
2.	Fasilitas Desa dapat dirasakan masyarakat	6 (20%)	24 (80%)	0	30 (100%)
Jumlah		11	49	0	60
Rata-rata		6	24	0	30
Persentase		20%	80%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai indikator efisiensi dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak bahwa dalam kategori cukup baik sebesar 80%, hal ini menandakan bahwa adanya upaya sidak untuk proses berjalannya program pendidikan, kesehatan dan kebudayaan yang akan berdampak pada pembangunan yang optimal karena terjadi banyak permasalahan, antara lain masyarakat yang tidak secara menyeluruh mengikuti kegiatan program ini sehingga dapat berdampak pada kemajuan pembangunan di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ini.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kaur Pemerintah Desa Bapak Arifin pada tanggal 05 September 2021, dalam melakukan kegiatan masyarakat ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lapangan serta dapat membuat laporan pengawasan tersebut. Adapun terkait upaya sidak ini

dilakukan baik saat berjalannya musyawarah program yang telah ditetapkan ataupun saat di lapangan untuk mengontrol jalannya pembangunan ditingkat desa. Dari adanya sidak tersebut maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat realisasi program pembangunan PAUD serta kegiatan POSYANDU yang akan dilaksanakan secara rutin.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam program pendidikan yang akan dilaksanakan untuk kemajuan masyarakat misalnya program Paket C, sementara syarat yang akan diberikan juga cukup banyak dan masyarakat harus mengikuti beberapa pelatihan sehingga alasan masyarakat sangat memberatkan jika harus mengikutinya karena alasan pekerjaan atau kesibukan lainnya. Program kebudayaan juga jarang dilakukan karena hanya dilakukan pada hari besar keagamaan saja misalnya menyambut bulan suci ramadhan maupun lebaran.

Dapat disimpulkan indikator efisiensi dalam kategori cukup baik, hal ini menandakan bahwa adanya kurangnya partisipasi masyarakat untuk bermusyawarah dikampung melalui musyawarah bersama antar kampung untuk membuat atau merencanakan program pembangunan desa.

### **c. Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang

menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator kecukupan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.5. Distribusi jawaban responden terhadap indikator kecukupan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penghulu	24 (80%)	6 (20%)	0	30 (100%)
2.	Seberapa Besar pengaruh keberadaan penghulu bagi masyarakat	23 (77%)	7 (23%)	0	30 (100%)
Jumlah		47	13	0	60
Rata-rata		23	7	0	30
Persentase		77%	23%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai kecukupan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam kategori baik sebanyak 82%, hal ini menandakan bahwa anggota yang ikut bergabung dalam program yang ditentukan oleh pihak desa baik itu program pendidikan, kebudayaan maupun kesehatan yang dinilai dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan antusias masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang tidak aktif dan keberatan untuk mengikuti program ini.

Sementara itu hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Yuti pada tanggal 05 September 2021, dalam melakukan musyawarah ini pentingnya bagi kami anggota musyawarah untuk menerapkan disiplin agar program yang akan dilakukan juga dapat selesai dengan tepat waktu dan optimal, misalnya untuk masyarakat yang akan mengikuti program paket C. Hal ini menandakan dengan disiplin para anggota maka kami berharap banyak akan terus mempertahankan kondisi seperti ini. Peraturan yang dibuat walaupun sistemnya mengikat tetapi juga demi kebaikan para anggota agar tidak bekerja semena-mena dan tetap semangat dalam mewujudkan pembangunan yang telah diprogramkan sehingga program paket C ini akan selesai dengan baik dan membawa perubahan bagi masyarakat yang kurang pendidikannya.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam program yang ditetapkan oleh pihak desa baik itu program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan yang menjadi permasalahan yaitu program pendidikan dan

kebudayaannya karena dinilai tidak efektif dilakukan didesa karena tidak banyak masyarakat yang merasa puas dengan program yang diberikan serta tidak banyak masyarakat yang berantusias untuk mengikuti program tersebut.

Dapat disimpulkan indikator kecukupan dalam kategori baik, hal ini menandakan bahwa tujuan dari program pemberdayaan ini sudah mencukupi untuk mengembangkan kampung dengan lebih baik lagi agar maju dan pembangunan dapat diselesaikan sehingga semua masyarakat dapat juga merasakan perubahan atas pembangunan yang dilakukan.

#### **d. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada).

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator efisiensi dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.6. Distribusi jawaban responden terhadap indikator ketepatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Tercapainya target yang sudah direncanakan	5 (17%)	25 (83%)	0	30 (100%)
2.	Direncanakan seberapa besar	6 (14%)	24 (86%)	0	30 (100%)
Jumlah		11	49	0	60
Rata-rata		5	25	0	30
Persentase		17%	83%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai indikator ketepatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak bahwa dalam kategori cukup baik sebesar 83%, hal ini menandakan bahwa target dalam pelaksanaan program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan kurang sesuai dengan realisasinya, dimana masyarakat yang didata untuk mengikuti program pendidikan paket C tidak sesuai dengan yang mengikutinya, sedangkan untuk program kesehatan sudah berjalan dengan baik dan kebudayaan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sementara itu hasil wawancara dengan Penghulu Bapak Baharuddin pada tanggal 05 September 2021, dalam melaksanakan program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan ini, kami pihak desa sangat berantusias sekali karena kami ingin liat masyarakat kami maju-maju semua dan memiliki masa depan yang baik terutama dari segi pendidikannya karena kami merasa hanya pendidikan yang

bermasalah didesa ini. Untuk itu kami mendorong masyarakat untuk mengikuti program ini, akan tetapi target kerja kami untuk melaksanakan program ini tidak sesuai dengan keinginan karena banyak masyarakat yang enggan untuk mengikutinya. Kami akan berusaha lagi cari jalan keluar untuk masalah ini.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masalah anggota yang tidak selalu mengikuti proses program pendidikan paket C, Karen mereka menilai umur yang sudah tidak muda dan kesibukan akan pekerjaannya makanya tidak membuat masyarakat dalam mengikuti program ini terutama program pendidikan yang akan dilakukan secara rutin ini.

Dapat disimpulkan indikator ketepatan dalam kategori cukup baik, hal ini menandakan bahwa ada sebagian masyarakat yang merasa tujuan penyuluhan ini kurang tepat sasaran sehingga tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengikuti program pemberdayaan ini.

#### **e. Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan,

juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Untuk dapat melihat hasil tanggapan pegawai mengenai indikator responsivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.7. Distribusi jawaban responden terhadap indikator responsivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Bertambahnya pendapatan hasil desa	6 (20%)	24 (80%)	0	30 (100%)
2.	Bertambahnya fasilitas umum desa	3 (10%)	27 (90%)	0	30 (100%)
Jumlah		9	51	0	60
Rata-rata		4	26	0	30
Persentase		13%	87%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai indikator responsivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam kategori cukup sebanyak 87%, hal ini menandakan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan sudah diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat akan tetapi masyarakat menilai bentuk program yang akan dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat berharap diberikan bantuan dana untuk modal usaha bukan berkeinginan untuk mengikuti program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan.

Sementara itu hasil wawancara dengan Penghulu Bapak Baharuddin pada tanggal 05 September 2021, diketahui bahwa dalam melakukan program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan ini ada target-target yang akan dicapai, misalkan target penyelesaian pelaksanaan program paket C serta

program-program apa saja yang akan dilakukan dan pencocokan anggaran dengan program yang telah ditetapkan tersebut. Apabila terjadi permasalahan baik dalam program maupun proses pembangunan kecamatan maka pihak kecamatan harus mengambil tindakan yaitu solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi kebijakan pihak camat untuk melaksanakan dan menetapkan program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ada terjadinya penetapan program pembangunan yang tidak terealisasi saat pelaksanaannya, hal ini terkait anggaran kecamatan yang kurang serta tidak adanya pengawasan pihak kecamatan di lapangan sehingga program yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan terutama dalam program pendidikan sementara yang sudah sesuai dengan harapan hanya program kesehatannya saja. Permasalahan ini menjadi pembelajaran agar pihak kecamatan harus merinci semua kegiatan serta anggaran yang sesuai sehingga proses pembangunan kedepannya lebih optimal.

Dapat disimpulkan indikator responsivitas dalam kategori cukup baik, hal ini menandakan bahwa untuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kampung mendapat respon yang cukup diminati masyarakat, karena tidak semua masyarakat yang mengetahui tujuan dari program pemberdayaan ini sehingga perlu adanya sosialisasi program ini kepada masyarakat.

#### **f. Perataan**

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn

menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan

pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

(Dunn, 2003: 435-436)

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”  
(Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan pegawai mengenai indikator perataan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.8. Distribusi jawaban responden terhadap indikator perataan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Seberapa besar masyarakat yang terlayani oleh penghulu	25 (83%)	5 (17%)	0	30 (100%)
2.	Bertambahnya Fasilitas umum desa	22 (73%)	8 (27%)	0	30 (100%)
Jumlah		47	13	0	60
Rata-rata		23	7	0	30
Persentase		77%	23%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai indikator perataan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam kategori baik sebanyak 82%, hal ini menandakan bahwa anggota yang mengikuti program tidak dapat mengikuti secara optimal, misalnya masyarakat hanya datang beberapa kali saja untuk mengikuti program paket C karena pekerjaan dan kesibukan maka banyak tidak hadirnya, sementara untuk dilaksanakan secara optimal dan berhasil masyarakat harus menyelesaikan semua mekanisme dalam program paket C tersebut.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Safri pada tanggal 06 September 2021, dalam melakukan program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lapangan serta dapat membuat laporan pengawasan. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan baik saat berjalannya program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan ataupun saat di lapangan untuk mengontrol

jalannya pembangunan ditingkat kecamatan, misalnya program POSYANDU, atau acara musik Gong yang dilaksanakan pada ahari besar maupun pelaksanaan program paket C. Dari adanya sidak tersebut maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat program pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masalah anggota yang tidak selalu mengikuti proses program, misalnya pada program pendidikan paket C yang diselenggarakan guna untuk kepentingan masyarakat sehingga proses pembangunan yang akan berjalan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari permasalahan yang terjadi maka diharapkan pihak kecamatan dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar mencari mufakat kebersamaan.

Dapat disimpulkan indikator perataan dalam kategori baik, hal ini menandakan bahwa anggota yang mengikuti program pemberdayaan ini sudah mengikuti secara menyeluruh dan berusaha mengembangkan program yang telah ditetapkan.

Berikut ini dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yaitu :

**Table V.16. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Efektivitas	8 (29%)	22 (71%)	0	30 (100%)
2.	Efisiensi	5 (11%)	25 (89%)	0	30 (100%)
3.	Kecukupan	23 (82%)	7 (18%)	0	30 (100%)
4.	Ketepatan	5 (11%)	25 (89%)	0	30 (100%)
5.	Responsivitas	4 (14%)	26 (86%)	0	30 (100%)
6.	Perataan	23 (82%)	8 (18%)	0	30 (100%)
<b>Jumlah</b>		64	104	0	180
<b>Rata-rata</b>		11	17	0	30
<b>Persentase</b>		39%	61%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, secara keseluruhan responden banyak menyatakan cukup baik yaitu sebesar 61%, hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya pembinaan masyarakat ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berartipembangunan yang akan diselenggarakan oleh pihak desa kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksana karena terdapat beberapa kendala yang salah satunya kurang berpartisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa.

**C. Hambatan-hambatan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar besar saja yang dating turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan.

- b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut baik berasal dari

PEMDA maupun Yayasan. Akan tetapi lancarnya program-program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan tenaga teknis maupun masyarakat bertanggung pencairan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dicairkan pihak Pemerintah setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat.

- c. Dalam organisasi Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Seharusnya setiap anggota tetap Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sudah ada tugas-tugasnya masing-masing, akan tetapi ada juga anggota Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga program pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator efektivitas dalam kategori cukup baik, hal ini diartikan belum tercapai target pelaksanaan dari program pemberdayaan yang tidak dapat berjalan secara optimal dan program yang akan dicapai belum tersusun dengan baik sehingga sampai saat ini pembangunan desa belum seutuhnya selesai.
2. Indikator efisiensi dalam kategori cukup baik, hal ini menandakan bahwa adanya kurangnya partisipasi masyarakat untuk bermusyawarah dikampung melalui musyawarah bersama antar kampung untuk membuat atau merencanakan program pembangunan desa.
3. Indikator kecukupan dalam kategori baik, hal ini menandakan bahwa tujuan dari program pemberdayaan ini sudah mencukupi untuk mengembangkan kampung dengan lebih baik lagi agar maju dan pembangunan dapat diselesaikan sehingga semua masyarakat dapat juga merasakan perubahan atas pembangunan yang dilakukan.
4. Indikator ketepatan dalam kategori cukup baik, hal ini menandakan bahwa ada sebagian masyarakat yang merasa tujuan penyuluhan ini kurang tepat

sasaran sehingga tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengikuti program pemberdayaan ini.

5. Indikator responsivitas dalam kategori cukup baik, hal ini menandakan bahwa untuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kampung mendapat respon yang cukup diminati masyarakat, karena tidak semua masyarakat yang mengetahui tujuan dari program pemberdayaan ini sehingga perlu adanya sosialisasi program ini kepada masyarakat.
6. Indikator perataan dalam kategori baik, hal ini menandakan bahwa anggota yang mengikuti program pemberdayaan ini sudah mengikuti secara menyeluruh dan berusaha mengembangkan program yang telah ditetapkan.
7. Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam kategori cukup baik.
8. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan kampung di Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam perencanaan program pembangunan yaitu :
  - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.
  - b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

- c. Dalam organisasi Masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

#### **B. Saran-saran**

1. Bagi Pemerintah Desa diharapkan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pembangunan untuk kemajuan masyarakat desa itu sendiri.
2. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka Penghulu Kampung Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan desa.
3. Peranan Penghulu Kampung Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat harus semakin ditingkatkan dan untuk itu Penghulu Kampung Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak harus dapat menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat desa, baik yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anantanyu, Sapja. 2011. *Kelembagaan, Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitas*, Jakarta, SEPA.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta.
- Crawford, John.2000. Ed. 2,1,: *Aslib, The Association For Information Management and Information Management International*, London.
- Curzon. 2008. *Jurisprudence Then Book Series, MC. Donals and Evans*.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi dan Kelembagaan*, Yogyakarta, CV. Andri Offset.
- Husein, Umar. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah :Pola Kegiatan, Kekuasaandan Prilaku Kepada Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil dan Cristine. 2003. *Kybernolog ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Manullang. M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nanang, Martono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, PT. Rajawali pers.
- Ndara, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Seri Ilmu Pemerintahan – Pelayanan Public & Custumer Satisfaction*, Bandung, PT. Alumni.
- Nogi, Hasel. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Balairung dan Co. Yogyakarta.

- Nugroho Bramasto. 2010. *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat*, Bandung, JMHT.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Palulus, Wirutomo dkk. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Cipruy.
- Pasolong, Harbani.2010, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Santoso, Panji.2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Santoso, Purwo, 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta, UGM Press.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance*, Bandung, Mandar Maju.
- Siagian, S. P, 2002. *Teori Pembangunan Organisasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soetomo.2011. *Pemberdayaan Masyarakat akan muncul antitesisnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Subarsono, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta, Gadjahmada Press.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Sumaryadi, Nyoman, 2013.*Sosialogi Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, hessel Nogi, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Wasistiono, Sadudan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, Fokusmedia.
- Widjaja, H.A.W. 2003.*Otonomi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wirutomodkk, 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT. Refika Aditama.

## Dokumen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang: *Pemerintahan Daerah*.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang: *Desa Pada Pasal 26 “ Kepala Desa Bertugas Menyelenggarakan, Memerintahkan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang: *Peraturan Pelaksanaan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang: Desa*.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang: *Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung pada BAB III Pasal 3, Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari Penghulu dan Perangkat Kampung*.

